

ABSTRAKSI

Niat pemerintah Indonesia untuk menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu sumber devisa yang dapat diandalkan agaknya akan menjadi kenyataan. Dalam percaturan wisata internasional, khususnya di Asia Pasifik, Indonesia telah menjadi salah satu primadona pariwisata yang patut diperhitungkan. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan wisata mancanegara tercatat 4,3 juta orang dengan tingkat pertumbuhan 16% per tahun. Dengan prospek industri pariwisata yang cerah ini, apalagi dengan semakin meningkatnya pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka berdampak bagi peningkatan produk layanan di sektor pariwisata. Mereka yang bergerak di sektor ini berlomba-lomba untuk memberikan mutu pelayanan yang terbaik.

Surabaya selain terkenal sebagai tujuan wisata, juga terkenal sebagai pusat industri dan perdagangan. Kondisi tersebut memungkinkan banyaknya orang yang berkunjung ke kota Surabaya, baik untuk tujuan wisata maupun untuk tujuan bisnis. Ini dibuktikan dengan perumbuhan turis di Surabaya sebesar 12,1%.

Jumlah hotel yang berdiri di Surabaya semakin hari semakin bertambah, dan tentunya hal ini menimbulkan persaingan dalam bisnis perhotelan. Persaingan ini tidak sebatas pada mutu layanan saja tapi juga termasuk persaingan tarif. Persaingan dalam bentuk perang tarif ini bertujuan untuk mendongkrak tingkat hunian kamar hotel, hal ini dikarenakan transaksi dari penjualan kamar hotel merupakan transaksi utama operasional badan usaha sehari-hari.

Karena transaksi penjualan kamar hotel merupakan transaksi penting dan jumlahnya material, maka dibutuhkan adanya pengawasan untuk menjamin tidak timbul kecurangan-kecurangan dan penyelewengan-penyelewengan yang berakibat kerugian pada badan usaha.

Masalah yang timbul dari hotel "X" adalah terjadinya perangkapan fungsi pada bagian receptionist, dimana selain menerima tamu yang datang, receptionist juga melakukan

penerimaan pembayaran dan sekaligus mencatat pada daily income partial report. Perangkapan tugas ini bisa berakibat buruk bagi badan usaha/hotel "X" karena mungkin saja terjadi penjualan kamar yang tidak dilaporkan/dicatat (tidak sah). Selain itu masalah lain yang timbul adalah adanya pemberian diskon tambahan yang besarnya relatif tergantung dari lamanya menginap. Pemberian diskon tambahan ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan cara menggelapkannya (masuk ke kantong sendiri).

Untuk itu dilakukan serangkaian audit prosedur dengan pendekatan substantif test dan compliance test. Dengan pengujian substantif kita dapat mengetahui apakah ada kesalahan rupiah, baik dalam perhitungan ataupun dalam pencatatan. Pengujian substantif bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti dari transaksi-transaksi sehubungan dengan masalah penjualan dan penagihan. Sedangkan pengujian compliance lebih mendekati lagi pada unsur pengendalian internal badan usaha, disitu kita dapat melihat apakah pengendalian internal badan usaha sudah dijalankan sesuai dengan apa yang telah digariskan, sehingga dapat menjamin kekayaan badan usaha pada akhirnya.